



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Hukum  
Program Studi S2 Hukum**

Kode Dokumen

## **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung jawab pemerintahan dalam hidup bernegara	1.1. pemahaman tentang konsep tanggung jawab pemerintahan 2.2. mampu menerapkan konsep tanggung jawab pemerintahan dalam hidup bernegara	<b>Kriteria:</b> pemahaman tentang konsep tanggung jawab pemerintahan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif		rapkan kon 100	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung jawab pemerintahan dalam hidup bernegara <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.</i> Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.	5%
2	mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung jawab pemerintahan dalam hidup bernegara	1.1. pemahaman tentang konsep tanggung jawab pemerintahan 2.2. mampu menerapkan konsep tanggung jawab pemerintahan dalam hidup bernegara	<b>Kriteria:</b> pemahaman tentang konsep tanggung jawab pemerintahan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif		rapkan kon 100	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung jawab pemerintahan dalam hidup bernegara <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.</i> Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.	5%
3	mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung gugat perdata tanggung gugat pemerintah	1.1. mampu menganalisis tanggung gugat perdata dalam ketentuan 1365 2.mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> analisis kasus  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif		daring	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung gugat perdata tanggung gugat pemerintah <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.</i> Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.	5%

4	mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung gugat perdata tanggung gugat pemerintah	1.1. mampu menganalisis tanggung gugat perdata dalam ketentuan 1365 2.mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> analisis kasus <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif		daring	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep tanggung gugat perdata tanggung gugat pemerintah <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.</i> Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.	5%
5	mampu menganalisis dan menerapkan konsep sengketa pemerintahan dan sengketa TUN pasca UU Administrasi Pemerintahan	1.1. mampu menganalisis tanggung gugat perdata dalam ketentuan 1365 2.mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> analisis kasus <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio		daring	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep sengketa pemerintahan dan sengketa TUN pasca UU Administrasi Pemerintahan <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.</i> Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.	5%
6	mampu menganalisis dan menerapkan konsep sengketa pemerintahan dan sengketa TUN pasca UU Administrasi Pemerintahan	1.1. mampu menganalisis tanggung gugat perdata dalam ketentuan 1365 2.mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> analisis kasus <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio		daring	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep sengketa pemerintahan dan sengketa TUN pasca UU Administrasi Pemerintahan <b>Pustaka:</b> 2. <i>P. M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Good Governance.</i> Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010	5%
7	mampu menganalisis dan menerapkan konsep sengketa pemerintahan dan sengketa TUN pasca UU Administrasi Pemerintahan	1.1. mampu menganalisis tanggung gugat perdata dalam ketentuan 1365 2.mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> analisis kasus <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio		daring	<b>Materi:</b> mampu menganalisis dan menerapkan konsep sengketa pemerintahan dan sengketa TUN pasca UU Administrasi Pemerintahan <b>Pustaka:</b> 1. <i>Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia:</i>	5%

					<p>sebuah studi kasus tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), Jakarta, Rajawali Press Tatiek Sri Djatmiati, Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan dalam Tanggung Jawab atau Tanggung Gugat Negara, Makalah disampaikan pada Lokarya Hukum Administrasi dan Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 28-30 Oktober 2008 M.A. Moegni Djojodirjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita</p>	
8	UTS	evaluasi	<p><b>Kriteria:</b> analisis kasus</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Tes</p>	daring 100	<p><b>Materi:</b> UTS</p> <p><b>Pustaka:</b> 4. Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Pemerintahan</p>	15%

9	mampu menganalisis problem normatif UU Administrasi Pemerintahan	analisis kasus yang terkait problem normatif UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa mampu menganalisis problem normatif UU Administrasi Pemerintahan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio		daring 100	<b>Materi:</b> mampu menganalisis problem normatif UU Administrasi Pemerintahan <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.</i> <i>Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.</i>	5%
10	mampu menganalisis problem normatif UU Administrasi Pemerintahan	analisis kasus yang terkait problem normatif UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> analisis  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio		daring 100	<b>Materi:</b> mampu menganalisis problem normatif UU Administrasi Pemerintahan <b>Pustaka:</b>	5%
11	mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	Mahasiswa memiliki ketepatan dalam menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa memiliki Kemampuan dalam menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio		daring 100	<b>Materi:</b> mampu menganalisis tanggung gugat pemerintah menurut pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan <b>Pustaka:</b> 2. <i>P. M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Good Governance.</i> <i>Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010</i>	5%
12	1.mampu menerapkan prosedur dan tahapan pengajuan tanggung gugat kepada pemerintah 2.mampu membandingkan maladministrasi di Indonesia dengan negara Eropa Kontinental (western law traditional)	1.1. menerapkan dalam pengajuan tanggung gugat kepada pemerintah 2.2. membandingkan maladministrasi di Indonesia dengan negara Eropa Kontinental (western law traditional)	<b>Kriteria:</b> analisis  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio		daring 100	<b>Materi:</b> mampu menerapkan prosedur dan tahapan pengajuan tanggung gugat kepada pemerintah <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.</i> <i>Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.</i>  <b>Materi:</b> membandingkan maladministrasi di Indonesia dengan negara Eropa Kontinental (western law traditional) <b>Pustaka:</b> 1. <i>Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: sebuah studi kasus tentang</i>	5%

*Prinsip-  
Prinsipnya,  
Penanganannya  
oleh Pengadilan  
dalam  
Lingkungan  
Peradilan  
Umum dan  
Pembentukan  
Peradilan  
Administrasi  
Negara,  
Surabaya, Bina  
Ilmu  
Ridwan HR,  
2011, Hukum  
Administrasi  
Negara (edisi  
revisi),  
Jakarta,  
Rajawali  
Press  
Tatiek Sri  
Djatmiati,  
Kesalahan  
Pribadi dan  
Kesalahan  
Jabatan  
dalam  
Tanggung  
Jawab atau  
Tanggung  
Gugat  
Negara,  
Makalah  
disampaikan  
pada  
Lokarya  
Hukum  
Administrasi  
dan Korupsi,  
Fakultas  
Hukum  
Universitas  
Airlangga,  
Surabaya,  
28-30  
Oktober  
2008  
M.A. Moegni  
Djojodirjo,  
1982,  
Perbuatan  
Melawan  
Hukum,  
Jakarta,  
Pradnya  
Paramita*

13	1.mampu menerapkan prosedur dan tahapan pengajuan tanggung gugat kepada pemerintah 2.mampu membandingkan maladministrasi di Indonesia dengan negara Eropa Kontinental (western law traditional)	1.1. menerapkan dalam pengajuan tanggung gugat kepada pemerintah 2.2. membandingkan maladministrasi di Indonesia dengan negara Eropa Kontinental (western law traditional)	<b>Kriteria:</b> analisis  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio		daring 100	<b>Materi:</b> mampu menerapkan prosedur dan tahapan pengajuan tanggung gugat kepada pemerintah <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.</i> Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.  <b>Materi:</b> membandingkan maladministrasi di Indonesia dengan negara Eropa Kontinental (western law traditional) <b>Pustaka:</b> 2. <i>P. M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Good Governance.</i> Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010	5%
14	mampu menganalisis kapita selektiva kasus tanggung gugat pemerintah dan maladministrasi	analisis kasus tanggung gugat pemerintah dan maladministrasi	<b>Kriteria:</b> analisis kasus  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio		daring 100	<b>Materi:</b> mampu menganalisis kapita selektiva kasus tanggung gugat pemerintah dan maladministrasi <b>Pustaka:</b> 3. <i>Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah &amp; Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.</i> Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.	5%
15	mampu menganalisis kapita selektiva kasus tanggung gugat pemerintah dan maladministrasi	analisis kasus tanggung gugat pemerintah dan maladministrasi	<b>Kriteria:</b> analisis kasus  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio		daring 100	<b>Materi:</b> mampu menganalisis kapita selektiva kasus tanggung gugat pemerintah dan maladministrasi <b>Pustaka:</b> 2. <i>P. M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Good Governance.</i> Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010  <b>Materi:</b> mampu menganalisis kapita selektiva kasus tanggung gugat pemerintah dan	5%

maladministrasi  
**Pustaka:** 1.  
Philipus M.  
Hadjon, 1987,  
Perlindungan  
Hukum Bagi  
Rakyat  
Indonesia:  
sebuah studi  
kasus tentang  
Prinsip-  
Prinsipnya,  
Penanganannya  
oleh Pengadilan  
dalam  
Lingkungan  
Peradilan  
Umum dan  
Pembentukan  
Peradilan  
Administrasi  
Negara,  
Surabaya, Bina  
Ilmu  
Ridwan HR,  
2011, Hukum  
Administrasi  
Negara (edisi  
revisi),  
Jakarta,  
Rajawali  
Press  
Tatiek Sri  
Djatmiati,  
Kesalahan  
Pribadi dan  
Kesalahan  
Jabatan  
dalam  
Tanggung  
Jawab atau  
Tanggung  
Gugat  
Negara,  
Makalah  
disampaikan  
pada  
Lokarya  
Hukum  
Administrasi  
dan Korupsi,  
Fakultas  
Hukum  
Universitas  
Airlangga,  
Surabaya,  
28-30  
Oktober  
2008  
M.A. Moegni  
Djojodirjo,  
1982,  
Perbuatan  
Melawan  
Hukum,  
Jakarta,  
Pradnya  
Paramita

16	Ujian Akhir Semester	Ketepatan dan kemampuan mahasiswa dalam analisis dan penguasaan materi	<b>Kriteria:</b> Sangat baik, baik, cukup, kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	UAS 2 X 50		<b>Materi:</b> Ujian Akhir Semester <b>Pustaka:</b> 4. Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Pemerintahan	15%
----	----------------------	--	--	---------------	--	--	-----

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	45%
2.	Penilaian Portofolio	25%
3.	Tes	30%
		100%

#### Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposisional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 2 Desember 2024

Koordinator Program Studi S2  
Hukum

**UPM** Program Studi S2 Hukum



PUDJI ASTUTI  
NIDN 0027126003



NIDN 0007088801

